

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lembaga keuangan memegang peranan penting dalam mendorong pembangunan Indonesia, khususnya di bidang perekonomian. Sebagian besar penduduk Indonesia tinggal di pedesaan, sehingga pembangunan pedesaan merupakan bagian dari pembangunan nasional. Di pedesaan lembaga keuangan mikro (LKM) turut membantu pemerintah dalam mencapai tujuan untuk mengentaskan kemiskinan di pedesaan. Dari sisi ekonomi, berbagai usaha terus berkembang, baik yang bergerak di bidang jasa, perdagangan, maupun manufaktur. Semakin maju suatu usaha, maka semakin maju pula negara tersebut kemajuan suatu negara dapat diukur dari Tingkat pertumbuhan ekonominya. Tingkat pertumbuhan ekonomi yang baik di suatu negara tidak terlepas dari peran Lembaga keuangan. Di Provinsi Bali, selain perbankan, terdapat Lembaga keuangan mikro lain yang memegang peranan penting dalam Pembangunan daerah, Lembaga keuangan mikro yang di maksud di sini adalah Lembaga perkreditan desa (LPD) yang terdapat di setiap desa adat (Mahaendrayasa & Putri, 2017)

Lembaga perkreditan desa (LPD) merupakan Lembaga keuangan Tingkat desa yang berkedudukan di lingkungan desa dan melayani krama desa. Krama desa merupakan masyarakat desa yang berada dalam suatu wilayah desa tertentu dan terikat oleh adat istiadat dan budaya desa tersebut. LPD merupakan Lembaga keuangan milik desa adat yang telah berkembang untuk memberikan manfaat sosial, ekonomi, dan budaya kepada para anggotanya, sehingga perlu dibina,

ditingkatkan kinerjanya, serta diperkuat dan dipertahankan seumur hidup (Yogamaheswara *et al.*, 2023) Meskipun pengelolaannya sederhana, LPD dapat memberikan banyak manfaat bagi Masyarakat desa, seperti mendorong pembangunan ekonomi masyarakat desa melalui simpanan yang tepat sasaran dan alokasi dana yang efektif, melarang pegadaian ilegal, menciptakan pemerataan dan kesempatan berusaha bagi warga desa dan tenaga kerja di pedesaan, meningkatkan daya beli dan melancarkan lalu lintas pembayaran dan peredaran uang di desa (Budiasni *et al.*, 2021).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Provinsi Bali No. 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa, Lembaga Perkreditan Desa sangat penting bagi kesejahteraan masyarakat adat yang dikenal sebagai krama desa pakraman. Lembaga perkreditan desa memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan budaya bagi krama desa pakraman. Aturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Provinsi Bali No. 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa diatur dalam Peraturan Gubernur No. 44 Tahun 2017.

Sebagai Lembaga yang bertugas menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat, kualitas laporan keuangan Lembaga perkreditan desa (LPD) menjadi salah satu indikator penting dalam penilaian kinerjanya. Oleh karena itu, perlu dibentuk suatu Lembaga daerah yang mampu memberikan pendampingan kepada Masyarakat daerah dalam bidang Pembangunan dan perekonomian, serta diharapkan dapat menjadi modal dalam menghadapi berbagai perubahan. Menurut Kurniawan *et al.*, (2020) LPD sebagai salah satu lembaga keuangan yang memiliki kewajiban untuk menyusun laporan keuangan sebagai bentuk pertanggung jawaban atas kegiatan perekonomian yang telah dilakukan dan sebagai dasar dalam

pengambilan keputusan. Tentunya setiap lembaga keuangan mengharapkan agar laporan keuangan yang disusunnya memiliki kualitas yang baik karena akan berpengaruh terhadap perkembangan lembaga keuangan itu sendiri.

Sesuai dengan ketentuan yang ada, lembaga perkreditan desa harus terus berkembang dan bersaing di lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, lembaga ini harus memperbaiki kinerjanya dengan menyajikan laporan keuangan yang akurat dan mencerminkan keadaan yang sebenarnya. LPD didirikan untuk merangsang, memajukan, dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat lokal. Namun, LPD juga menghadapi berbagai tantangan, seperti beberapa lembaga yang tidak aktif atau bermasalah dengan kualitas laporan keuangan mereka. Berdasarkan data dari Lembaga Pemberdayaan Lembaga Perkreditan Desa (LPLPD) Gianyar tahun 2025, ada 36 LPD yang beroperasi di Kecamatan Tampaksiring, di mana dua di antaranya mengalami kendala terkait laporan keuangan, yaitu LPD Kulub dan LPD Belusung. Permasalahan yang dialami LPD Kulub disebabkan oleh kredit macet akibat dampak COVID-19, sehingga mereka tidak mengirimkan laporan keuangan, juga dikarenakan penyalahgunaan dana nasabah melalui praktik pemberian kredit fiktif serta ketidakharmonisan antar karyawan.

Sedangkan untuk LPD Belusung, permasalahan muncul akibat tindakan korupsi yang melibatkan manipulasi data keuangan transaksi lembaga. Dalam kasus ini, dana tabungan nasabah tidak dicatat oleh pelaku baik di dalam data maupun sistem komputer, sehingga laporan keuangan menjadi tersendat. Tindakan tersebut diakui oleh pelaku telah dilakukan sejak tahun 2018 hingga 2020, yang mengakibatkan kerugian bagi LPD desa adat Belusung sebesar 2,6 miliar (NusaBali.Com., 2022).

Kabupaten Gianyar terdiri dari 7 kecamatan yang terdapat LPD sebagai sarana pengelolaan keuangan desa pada tiap daerah di kecamatan. Berikut merupakan data LPD yang beroperasi dan tidak beroperasi tiap kecamatan di Kabupaten Gianyar.

Tabel 1. 1
Daftar Seluruh LPD Kabupaten Gianyar

NO	Kecamatan	Jumlah seluruh LPD masing-masing Kecamatan
1	Blahbatuh	36 Unit
2	Gianyar	40 Unit
3	Payangan	48 Unit
4	Sukawati	33 Unit
5	Tampaksiring	36 Unit
6	Tegalalang	45 Unit
7	Ubud	32 Unit
	TOTAL	270 Unit

Sumber: Laporan Gabungan LPLPD Kab. Gianyar, 2026

Pada tahun 2025, variabilitas jumlah Lembaga Perkreditan Desa (LPD) terlihat di berbagai kecamatan yang ada di Kabupaten Gianyar. Kecamatan Payangan menempati posisi tertinggi dengan 48 unit LPD, diikuti oleh Tegallalang yang memiliki 45 unit. Sementara itu, Kecamatan Gianyar berada di posisi ketiga dengan 40 unit. Kecamatan Tampaksiring dan Blahbatuh masing-masing mengelola 36 unit, sedangkan Sukawati memiliki 33 unit. Ubud menjadi kecamatan dengan jumlah paling sedikit, mencatatkan 32 unit. Secara keseluruhan, LPD yang beroperasi di Kabupaten Gianyar berjumlah 270 unit, meskipun beberapa di antaranya menghadapi kendala dalam operasional.

Penelitian ini difokuskan pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Tampaksiring karena LPD memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat desa adat setempat. LPD sangat penting sebagai sumber pembiayaan dan pengelolaan keuangan bagi masyarakat desa karena aktivitas ekonomi masyarakat di Kecamatan Tampaksiring sebagian besar berfokus pada sektor pertanian, pariwisata, dan usaha mikro dan kecil. Menurut data Lembaga Pemberdayaan Lembaga Perkreditan Desa (LPLPD) Kabupaten Gianyar tahun 2025, ada 36 LPD yang masih beroperasi di Kecamatan Tampaksiring. Jumlah ini menunjukkan bahwa ada banyak LPD di kecamatan ini di Kabupaten Gianyar, dan oleh karena itu, Kecamatan Tampaksiring layak menjadi subjek penelitian untuk menyelidiki kualitas pengelolaan dan pelaporan keuangan LPD.

Namun, beberapa LPD di Kecamatan Tampaksiring masih mengalami masalah dengan kualitas laporan keuangan. Dilaporkan bahwa dua LPD, LPD Belusung dan LPD Kulub, mengalami kesulitan dalam menyusun laporan keuangan. Permasalahan tersebut termasuk kredit macet yang disebabkan oleh pandemi COVID-19, penyalahgunaan dana nasabah melalui praktik pemberian kredit fiktif, dan manipulasi data keuangan, yang menyebabkan pelaporan yang tertunda dan kerugian finansial. Kondisi ini menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan LPD di Kecamatan Tampaksiring masih perlu diperhatikan. Oleh sebab itu, Kecamatan Tampaksiring dipilih sebagai lokasi penelitian untuk mempelajari variabel yang memengaruhi kualitas laporan keuangan LPD di Kecamatan Tampaksiring.

Faktor Pertama yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah sejauh mana seseorang memahami akuntansi. Pemahaman akuntansi mengacu pada

kemampuan individu dalam menangkap aspek akuntansi, baik dari sudut pandang teori sebagai satu bidang ilmu, maupun dari sisi praktik sebagai proses pencatatan dan penyajian informasi keuangan (Suari *et al.*, 2019) Memunyai pemahaman yang kuat terhadap prinsip serta prosedur akuntansi sangatlah krusial, sebab hal ini berdampak langsung pada keakuratan dan keakuratan data yang terdapat dalam laporan keuangan. Seseorang dengan kecerdasan yang cukup dan pengetahuan akuntansi yang baik akan lebih mampu menyusun laporan keuangan yang berkualitas tinggi. Hal ini tentu saja dapat mengurangi kemungkinan kesalahan dalam menyampaikan informasi keuangan, yang biasanya terjadi karena kurangnya pemahaman mengenai konsep dasar akuntansi.

Hasil Penelitian yang dilakukan oleh pada Purwanti, (2020), Pratiwi *et al.*, (2025), Dewi *et al.*, (2019) menunjukkan bahwa Tingkat pemahaman akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Berbanding terbalik dengan penelitian Pebriantari *et al.*, (2021), Nur *et al.*, (2023), yang menyatakan Tingkat pemahaman akuntansi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Faktor kedua yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah pemanfaatan teknologi informasi, yang dikelola oleh pihak yang bertanggung jawab atas keuangan. Teknologi informasi mengacu pada sekelompok perangkat yang berhubungan dengan pemrosesan data menjadi informasi, serta distribusi data atau informasi dalam batasan ruang dan waktu tertentu. Dalam Pengelolaan keuangan pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD), penggunaan informasi meliputi perangkat komputer dan alat komunikasi yang memudahkan pelaksanaan tugas akuntansi dan pelaporan keuangan dengan cara yang lebih efektif dan efisien.

Ferdiana *et al.*, (2024) menjelaskan bahwa informasi teknologi sangat penting dalam proses akuntansi, terutama dalam membuat laporan keuangan. Teknologi ini mampu mengolah, menyimpan, dan menyajikan data secara sistematis, menghasilkan informasi yang tepat, relevan, dan akurat. Dengan kata lain, jika sistem informasi akuntansi yang berbasis teknologi digunakan dengan baik, maka proses pembuatan laporan keuangan dapat dilakukan lebih cepat dan efisien, serta mengurangi risiko kesalahan. Penggunaan teknologi informasi di LPD juga membantu meningkatkan kapasitas penyimpanan data, memudahkan akses informasi, serta mempercepat proses pengambilan keputusan yang berhubungan dengan keuangan. Hal ini memungkinkan LPD untuk menjalankan tugasnya sebagai agen bagi masyarakat adat sebagai *prinsipal*, dengan memberikan laporan keuangan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Hasil Penelitian oleh Erawati *et al.*, (2025) Pranata *et al.*, (2025) dan Asih (2022) menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berdampak positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan, semakin baik kualitas informasi keuangan yang dihasilkan. Berbanding terbalik dengan penelitian Mulya *et al.*, (2021), Apriada *et al.*, (2022) menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Perbedaan dalam temuan ini menunjukkan bahwa efektivitas teknologi dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan sangat bergantung pada cara penerapannya dan kesiapan sumber daya manusia yang mengelola sistem informasi tersebut.

Faktor ketiga yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan dari Lembaga adalah Fungsi badan pengawas. Sesuai dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengurus dan Pengawas Internal LPD, terutama di Pasal 10, dinyatakan bahwa badan pengawas bertanggung jawab penuh untuk melaksanakan pengawasan internal terhadap semua aktivitas di LPD. Dasar hukum untuk pembentukan badan pengawas LPD telah ditetapkan sebelumnya dalam Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 491 Tahun 1998 yang memberikan aturan khusus tentang pembentukan, penutupan, serta pemberhentian badan pengawas LPD di Provinsi Bali. Saputra *et al.*, (2020) berpendapat bahwa badan pengawas internal mempunyai peranan yang sangat penting, tidak hanya dalam mengawasi kebijakan dan operasional lembaga, tetapi juga terkait dengan praktik akuntansi dan proses laporan keuangan. Selain itu, badan pengawas juga berfungsi sebagai penghubung antara pengelola LPD dan auditor eksternal jika diperlukan, untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas lembaga keuangan. Beberapa penelitian telah dilakukan untuk menilai dampak fungsi badan pengawas pada kualitas laporan keuangan.

Hasil Penelitian oleh Dwiyantri *et al.*, (2023), Bhegawati *et al.*, (2021) Pebriantari *et al.*, (2021) menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi badan pengawas berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik peran badan pengawas dalam melaksanakannya, semakin tinggi pula kualitas informasi keuangan yang disajikan. Berbanding terbalik dengan penelitian Pradnyawati *et al.*, (2023) menemukan hasil yang berbeda, di mana mereka menyimpulkan bahwa keberadaan badan pengawas justru memberikan dampak negatif pada kualitas laporan keuangan. Temuan ini menunjukkan bahwa

mungkin badan pengawas tidak menjalankan fungsinya dengan efektif, mungkin ada konflik kepentingan yang mempengaruhi objektivitas pengawasan. Selain itu, Aspasia *et al.*, (2023) juga menyatakan bahwa fungsi badan pengawas tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Perbedaan antara hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas fungsi badan pengawas dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan sangat bergantung pada standar nyata di lapangan, termasuk kompetensi para pengawas, independensi, dan kerja sama antara badan pengawas dan pengelola LPD.

Faktor keempat yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah sistem pengendalian Intern, Sistem pengendalian internal adalah elemen penting dalam akuntansi yang dirancang dengan cara yang teratur untuk memastikan tercapainya tiga tujuan utama organisasi. Tiga tujuan tersebut adalah: (1) efisiensi dan efektivitas dalam operasional, (2) kejelasan laporan keuangan, serta (3) kepatuhan pada peraturan yang ada. Menurut Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dalam SA Seksi 319, setiap anggota dewan komisaris, manajemen, dan seluruh staf dari suatu entitas memiliki tanggung jawab untuk menerapkan sistem pengendalian internal. Tujuan dari sistem ini adalah menciptakan lingkungan kerja yang teratur, terkendali, dan jelas. Jika sistem pengendalian internal dirancang dan diterapkan dengan baik, ini dapat sangat membantu dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan. Hal ini terjadi karena sistem tersebut dapat mengurangi kemungkinan kesalahan pencatatan, penyimpangan data, dan potensi pemeliharaan selama penyusunan laporan keuangan. Dalam hal ini, pengendalian internal berfungsi sebagai alat yang penting untuk menjaga keutuhan informasi keuangan dan mendukung keputusan yang didasarkan pada data yang tepat.

Hasil Penelitian yang dilakukan oleh Lestari *et al.*, (2022), Arimbawa *et al.*, (2024), Nur *et al.*, (2023) menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Berbanding terbalik dengan penelitian Hamruna *et al.*, (2022), Abriyanti (2022) menyebutkan bahwa sistem pengendalian internal tidak memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Faktor Kelima yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah Profesionalisme, Profesionalisme dapat diartikan sebagai sikap dan tingkah laku yang menunjukkan komitmen, integritas, serta tanggung jawab seseorang dalam melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi yang ada. Menurut Iskandar *et al.*, (2020) profesionalisme adalah sikap dan perilaku individu saat menjalankan tugas profesinya dengan cara yang konsisten dan etis. Dalam bidang akuntansi, memiliki sikap profesional sangat penting untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan tidak hanya mengikuti prinsip-prinsip akuntansi, tetapi juga memiliki kewajaran, relevansi, dan akurasi yang tinggi. Orang yang menunjukkan profesionalisme yang tinggi akan melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab, kejujuran, serta berdasarkan tingkat keahlian dan kode etik profesinya. Dalam proses penyusunan laporan keuangan, aspek ini sangat penting karena setiap tahap pelaporan, dari pencatatan hingga penyajian data, memerlukan ketelitian dan integritas yang tinggi. Oleh karena itu, profesionalisme menjadi fondasi utama dalam menciptakan laporan keuangan yang berkualitas dan dapat dipercaya oleh semua pihak yang berkepentingan.

Hasil Penelitian yang dilakukan oleh Oktadelina *et al.*, (2021), Aspasia *et al.*, (2023), Pratiwi *et al.*, (2022), menunjukkan bahwa Profesionalisme berpengaruh

positif terhadap kualitas laporan keuangan. Berbanding terbalik dengan penelitian Shahrir *et al.*, (2024), menyebutkan bahwa Profesionalisme tidak memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dan kajian hasil – hasil penelitian terdahulu yang masih tidak konsisten, maka penulis mengambil keputusan untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Fungsi Badan Pengawas, Sistem Pengendalian Intern, Dan Profesionalisme Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Lembaga Perkreditan Desa (Lpd) Di Kecamatan Tampaksiring”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, rumusan masalah yang melandasi penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah pemahaman akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada LPD di Kecamatan Tampaksiring?
2. Apakah pemanfaatan teknologi Informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada LPD di kecamatan Tampaksiring?
3. Apakah fungsi badan pengawas berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada LPD di kecamatan Tampaksiring?
4. Apakah sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada LPD di kecamatan Tampaksiring?
5. Apakah profesionalisme berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada LPD di kecamatan Tampaksiring?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan pokok permasalahan yang disajikan penulis, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh pemahaman akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pada LPD di kecamatan Tampaksiring.
2. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pada LPD di kecamatan Tampaksiring.
3. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris Pengaruh fungsi badan pengawas terhadap kualitas laporan keuangan pada LPD di kecamatan Tampaksiring.
4. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pada LPD di kecamatan Tampaksiring.
5. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh profesionalisme terhadap kualitas laporan keuangan pada LPD di kecamatan Tampaksiring.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi pihak yang berkepentingan, Adapun manfaat yang diharapkan antara lain:

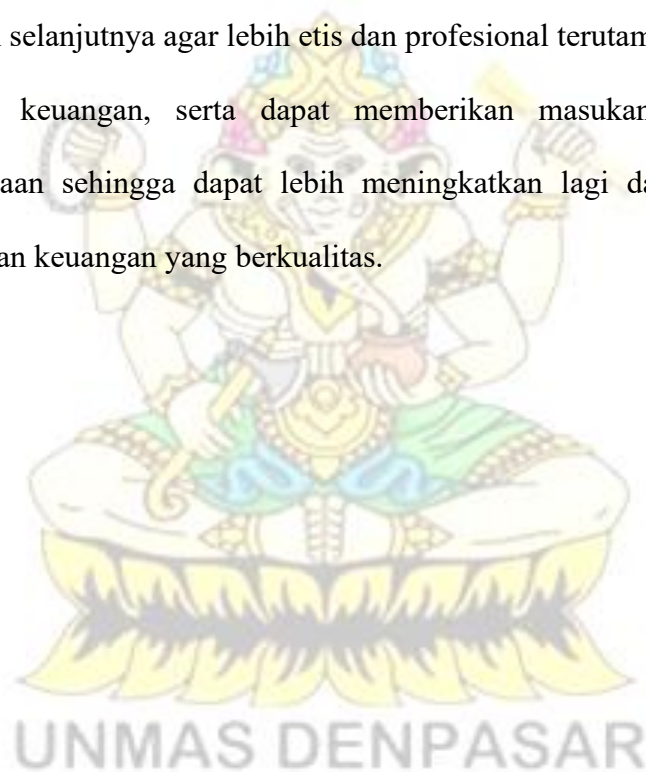
1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan wawasan dalam mengaplikasikan teori yang diperoleh dan membandingkan dengan

kondisi sebenarnya di lapangan, khususnya mengenai pengaruh pemahaman akuntansi, pemanfaatan teknologi informasi, fungsi badan pengawas, sistem pengendalian intern dan profesionalisme terhadap kualitas laporan keuangan pada LPD di kecamatan Tampaksiring, serta sebagai pedoman penelitian selanjutnya yang membahas lingkup masalah yang sama.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan untuk langkah selanjutnya agar lebih etis dan profesional terutama dalam kualitas laporan keuangan, serta dapat memberikan masukan kepada pihak perusahaan sehingga dapat lebih meningkatkan lagi dalam pembuatan pelaporan keuangan yang berkualitas.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Teory*)

Prinsip dasar dari teori keagenan adalah adanya kerja sama antara pemilik (*principal*) yang memberikan izin dan manajer (*agen*) yang menerima izin tersebut. Kerja sama ini menunjukkan bahwa ada kemungkinan adanya konflik kepentingan antara pemilik dan manajer, karena masing-masing memiliki kepentingan yang tidak sama. Manajer sebagai *agen* memiliki tanggung jawab moral untuk meningkatkan keuntungan pemegang saham (*principal*). Namun, di sisi lain, mereka juga berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan pribadi mereka, yang memungkinkan agen tidak selalu bertindak demi kepentingan terbaik bagi prinsipal (Jensen *et al.*, 1976).

Dalam kerangka teori keagenan, laporan perusahaan disusun oleh manajemen sebagai bentuk tanggung jawab mereka kepada pemilik perusahaan yang berperan sebagai prinsipal. Manajemen, yang memiliki akses informasi dan terlibat langsung dalam aktivitas perusahaan, memiliki dorongan untuk melaporkan perihal yang akan meningkatkan kepuasan mereka sendiri. Salah satu cara yang sering dilakukan adalah dengan merekayasa laba (*earning*) perusahaan, yang akan menjadi perhatian utama bagi pihak eksternal sesuai dengan motivasi di baliknya. Berdasarkan pandangan para ahli, teori keagenan adalah teori yang menjelaskan hubungan antara pemilik perusahaan dan manajer perusahaan. Disini, pemilik perusahaan menyerahkan wewenang kepada manajer untuk menjalankan aktivitas

perusahaan. Teori ini digunakan untuk menunjukkan adanya hubungan antara masyarakat sebagai prinsipal dan LPD sebagai agen. LPD berperan sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk memberikan laporan, menyajikan, dan mengungkapkan semua aktivitas serta kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada Masyarakat.

2.1.2 Pemahaman Akuntansi

Istilah pemahaman berasal dari kata dasar paham, yang dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia diartikan sebagai kemampuan untuk memahami dengan mendalam atau mengetahui dengan jelas suatu hal. Secara etimologis, pemahaman mengandung makna kecerdasan dalam menangkap makna serta kemampuan untuk mengetahui dan memahami sesuatu secara utuh dan tepat. Oleh karena itu, pemahaman dapat dimaknai sebagai suatu proses atau usaha yang dilakukan seseorang untuk memahami atau menjelaskan suatu konsep, informasi, atau pengetahuan tertentu.

Dalam konteks ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang akuntansi, pemahaman tidak hanya mencakup pengetahuan tentang istilah atau prosedur yang berlaku, tetapi juga penguasaan prinsip, konsep dasar, serta penerapannya dalam berbagai situasi praktis. Seseorang yang memahami akuntansi berarti ia tidak hanya mampu menghafal teori-teori akuntansi, tetapi juga dapat menjelaskan, menganalisis, serta menerapkan prinsip-prinsip tersebut saat menyusun laporan keuangan, mengambil keputusan ekonomi, dan memecahkan masalah akuntansi. Dengan demikian, pemahaman akuntansi dapat diartikan sebagai tingkat kemampuan individu dalam mengetahui, memahami, dan menginterpretasikan informasi akuntansi dengan benar dan tepat. Mereka yang memahami akuntansi

adalah individu yang tidak hanya memiliki pengetahuan teoritis, tetapi juga mampu menerapkan pengetahuan tersebut secara praktis sesuai dengan standar dan etika profesi akuntansi.

2.1.3 Pemanfaatan Teknologi Informasi

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah menekankan bahwa baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan di bidang informasi teknologi. Kewajiban ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah serta memberikan informasi keuangan yang transparan kepada masyarakat sebagai bentuk pelayanan publik.

Dengan pesatnya perkembangan informasi teknologi dan banyaknya potensi untuk penerapannya, berbagai pihak kini dapat mengakses, mengelola, serta memanfaatkan informasi keuangan daerah dengan lebih cepat, akurat, dan efisien. Salah satu keunggulan besar dari penggunaan teknologi informasi adalah kemampuannya dalam mempercepat proses pengolahan data. Hal ini sangat penting karena sistem akuntansi pemerintah daerah sering kali melibatkan transaksi yang kompleks dan dalam jumlah yang besar. Oleh karena itu, penerapan teknologi informasi yang diharapkan dapat mempercepat proses pembuatan laporan keuangan dan memastikan informasi yang tersedia akurat serta tepat waktu. Ketepatan waktu adalah salah satu ciri kualitas penting dalam laporan keuangan. Jika laporan keuangan disusun dan disampaikan dengan tepat waktu, maka informasi di dalamnya akan tetap relevan bagi penggunanya. Jadi, bisa disimpulkan bahwa ada

hubungan positif antara penggunaan teknologi informasi dengan akurasi waktu dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Menurut *Information Technology Association of America* (ITAA), teknologi informasi adalah bidang yang mencakup penelitian, desain, penerapan, pengembangan, dan manajemen sistem informasi berbasis komputer, yang fokus pada penggunaan perangkat keras dan perangkat lunak. Dalam pandangan Pratiwi *et al.*, (2022), teknologi didefinisikan sebagai kumpulan teknologi yang berkaitan dengan proses pengolahan data menjadi informasi dan distribusi informasi tersebut secara efektif di berbagai tempat dan waktu. Penggunaan teknologi ini memungkinkan pengolahan data secara elektronik sehingga masyarakat dapat dengan cepat, tepat, dan dengan biaya rendah memperoleh informasi yang diperlukan.

2.1.4 Fungsi Badan Pengawas

Menurut Peraturan Gubernur Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang pengurus dan pengawas internal lembaga perkreditan desa (LPD), khususnya di Pasal 10, tanggung jawab untuk melaksanakan fungsi pengawasan internal di LPD berada pada badan pengawas LPD. Badan ini memiliki peran penting untuk memastikan laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen tidak hanya akurat tetapi juga bebas dari manipulasi. Oleh karena itu, setiap LPD diwajibkan untuk memiliki sistem pengendalian internal yang baik, sehingga operasionalnya dapat berjalan secara efisien dan efektif serta dapat mencegah perlindungan otoritas yang berpotensi merugikan baik lembaga maupun masyarakat.

Sesuai dengan Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2007, pengawasan internal dipahami sebagai fungsi yang dilaksanakan oleh badan pengawas, yang merupakan lembaga yang dibentuk oleh desa adat untuk mengawasi pengelolaan LPD. Struktur dan fungsi badan ini juga diatur dalam keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 491 Tahun 1998 tentang pembentukan dan kedudukan badan pengawas. Dalam peraturan tersebut dinyatakan bahwa badan pengawas terdiri dari seorang ketua dan maksimal dua anggota, dengan ketua berasal dari Bendesa Adat. Agar independensi terjaga, baik ketua maupun anggota tidak boleh memegang jabatan lain di dalam struktur pengurus LPD. Tugas utama Badan Pengawas LPD mencakup: (1) menyampaikan informasi mengenai keberadaan dan fungsi LPD kepada Masyarakat. (2) memberikan dorongan dan motivasi untuk meningkatkan kinerja Lembaga. (3) mengawasi proses penyaluran kredit dan menangani kredit yang bermasalah serta (4) melaksanakan pelatihan dan pengawasan secara berkala berdasarkan program kerja yang telah dibuat.

Pada saat pelaksanaannya, Badan Pengawas LPD memiliki empat tanggung jawab utama, yaitu:

1. Fungsi Perencanaan

Pengawas harus terlibat dalam penyusunan rencana operasional lembaga untuk jangka waktu pendek dan panjang, yang harus menyeluruh dan terintegrasi.

2. Fungsi Pengendalian

Tanggung Jawab ini mencakup pembuatan norma dan standar yang akan menjadi panduan dalam melaksanakan kegiatan, sebagai alat untuk memungkinkan sejauh mana kinerja sesuai rencana.

3. Fungsi Pelaporan

Pengawas wajib untuk merencanakan, menyiarkan, dan menjelaskan hasil kinerja lembaga secara berkala, dan menyampaikannya dalam rapat rutin yang diselenggarakan sesuai sistem pelaporan internal.

4. Fungsi Akuntansi

Dalam konteks ini, pengawas berperan untuk mengembangkan serta memelihara sistem informasi akuntansi di seluruh unit LPD. Tujuannya adalah agar semua transaksi keuangan dicatat dengan benar dan dapat dipertanggungjawabkan, sesuai dengan prinsip pengendalian internal yang baik.

2.1.5 Sistem Pengendalian Intern

Pengawasan internal merupakan unsur penting dari sistem pengendalian internal yang berfungsi untuk memberikan penilaian obyektif mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi pada instansi pemerintah. Aspek yang diperhatikan dalam pengawasan ini meliputi kelembagaan, jaminan, kualitas sumber daya manusia, kode etik profesi, proses audit, sistem pelaporan, serta mekanisme pengawasan sejawat, yang dilakukan secara terencana dan berkelanjutan.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Intern (SPI) dijelaskan sebagai proses menyeluruh yang terus menerus dilaksanakan oleh semua tingkat manajemen dan pegawai di suatu instansi. penerapan SPI bertujuan untuk memberikan jaminan yang cukup berkenaan dengan

pencapaian tujuan organisasi melalui kegiatan yang efisien dan efektif, penyusunan laporan keuangan yang dapat diandalkan, perlindungan aset negara, serta kepatuhan pada peraturan yang berlaku. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, tepatnya dalam Pasal 1 ayat (10), sistem pengendalian intern diartikan sebagai proses yang dipengaruhi oleh manajemen dan dirancang untuk menjamin efektivitas, efisiensi, kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku, dan menjamin perangkat laporan keuangan daerah.

2.1.6 Profesionalisme

Profesionalisme dapat diartikan sebagai sikap dan tindakan seseorang dalam menjalankan tugas profesionalnya dengan penuh tanggung jawab, komitmen, serta integritas, dan selalu menjaga citra positif di depan publik Gusfiardi *et al.*, (2020) Orang yang bersikap profesional adalah mereka yang tahu dan melaksanakan tanggung jawab serta dibanggakan dengan baik, menjalin hubungan kerja yang sehat, dan menunjukkan konsistensi serta fokus dalam setiap aktivitas kerja. Dalam konteks pembuatan laporan keuangan, profesionalisme menjadi elemen penting yang mempengaruhi kualitas laporan tersebut. Menurut teori keagenan (*agency theory*), keberadaan laporan keuangan yang dapat diandalkan sangat penting untuk mempertahankan dan memperkuat hubungan antara *agen* (pengelola) dan *prinsipal* (pemilik sumber daya). Laporan keuangan yang disiapkan secara profesional dapat menciptakan transparansi dan mengurangi informasi yang tidak seimbang antara kedua belah pihak.

2.1.7 Kualitas Laporan Keuangan

Berdasarkan Peraturan Gubernur mengenai Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017, yang mengatur tentang Lembaga Perkreditan Desa, pasal 30 ayat 2, jenis laporan LPD terbagi menjadi tiga kategori sebagai berikut:

1. Laporan bulanan yang meliputi:
 - a. Laporan mengenai aktivitas dan perkembangan pinjaman
 - b. Neraca percobaan
 - c. Laporan neraca
 - d. Laporan Laba Rugi
2. Laporan triwulanan yang terdiri dari:
 - a. Laporan evaluasi kesehatan LPD dan
 - b. Laporan evaluasi peningkatan risiko LPD
3. Laporan tahunan yang terdiri dari:
 - a. Laporan RK-RAPB tahunan LPD
 - b. Laporan pertanggungjawaban prajuru di akhir tahun
 - c. Laporan pertanggungjawaban panureksa di akhir tahun

Laporan -laporan tersebut disusun oleh kepala LPLPD dan disampaikan kepada Gubernur melalui Biro Perekonomian Setda Provinsi Bali. Laporan bulanan LPD berisi pelaksanaan kegiatan LPLPD pada bulan sebelumnya dan perkembangan kinerja LPD yang bersifat kumulatif. Selain itu, laporan keuangan mencakup laporan dana pemberdayaan LPD sebesar 5 persen, laporan perlindungan LPD, laporan dana jaminan simpanan nasabah LPD, serta laporan dana likuiditas LPD yang juga mencakup rekonsiliasi 20 rekening tabungan masing -masing. Laporan tahunan, yang bersumber dari laporan bulanan dan triwulanan, juga

ditambah dengan evaluasi perkembangan kinerja keuangan LPD termasuk penanganan permasalahan yang dihadapi LPD.

Informasi yang terdapat dalam laporan keuangan ini akan memberikan pemahaman dan wawasan lebih dalam mengenai manajemen serta kondisi LPD. Manajemen berwenang untuk menyampaikan informasi sesuai dengan peraturan atau praktik yang dianggap penting bagi pihak luar. Tujuan dari laporan keuangan antara lain adalah untuk memberikan informasi tentang kinerja perusahaan selama periode tertentu, seperti pengeluaran kas, pinjaman, pelunasan pinjaman, serta transaksi modal, dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi likuiditas dan solvabilitas perusahaan.

Laporan keuangan perlu mempunyai kualitas tinggi agar dapat memberikan informasi yang berguna bagi para penggunanya. Kualitas dari laporan keuangan merupakan ciri-ciri yang ada pada laporan tersebut. Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 2015 No. 1, laporan keuangan yang baik memiliki empat ciri utama yaitu:

1. Relevan

Laporan keuangan disebut relevan jika yang disajikan dapat mempengaruhi keputusan pengguna, membantu mereka menilai peristiwa yang telah terjadi atau informasi yang sedang berlangsung, serta memprediksi masa depan. Informasi tersebut juga dapat menggambarkan atau menggambarkan hasil evaluasi di masa lalu. Ciri-ciri informasi yang relevan meliputi:

- a. Manfaat umpan balik, yaitu informasi yang memungkinkan pengguna untuk mengkonfirmasi atau memperbaiki ekspektasi mereka di masa lalu.
- b. Manfaat prediktif, yaitu yang membantu pengguna untuk membayangkan kejadian di masa yang akan datang berdasarkan hasil dari masa lalu dan kejadian informasi saat ini.
- c. Ketepatan waktu, yaitu informasi yang disajikan pada waktu yang tepat sehingga dapat memberikan pengaruh dan berguna pada saat proses pengambilan Keputusan.
- d. Kelengkapan, yaitu yang disajikan sekomprehensif mungkin, mencakup semua data akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dengan memperhatikan batasan informasi yang ada.

2. Andal

Sebuah laporan keuangan dianggap andal jika informasi yang terkandung di dalamnya tidak mengandung dan bebas dari kesalahan material. Informasi tersebut harus disajikan dengan jujur dan dapat dibenarkan. Ciri-ciri informasi yang andal adalah:

- a. Penyajian yang jujur, yaitu informasi yang dengan akurat menggambarkan transaksi dan peristiwa lain yang seharusnya disajikan atau yang wajar diharapkan untuk disajikan.
- b. Dapat diverifikasi, yaitu informasi dalam laporan keuangan dapat diuji dan, jika diuji lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda,

hasilnya akan tetap menunjukkan kesimpulan yang sama dan tidak jauh berbeda.

3. Dapat dibandingkan

Laporan keuangan dapat dibandingkan, artinya informasi yang disediakan dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas lain secara umum.

- a. Perbandingan internal dapat dilakukan jika entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dalam satu tahun.
- b. Perbandingan eksternal dapat dilakukan jika entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama antara entitas yang berbeda.

4. Dapat dipahami

Sebuah laporan keuangan dapat dikatakan dapat dipahami jika informasi yang disajikan mudah dipahami oleh pengguna dan disampaikan dalam istilah yang sesuai dengan tingkat pemahaman mereka.

Tujuan utama dari laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai keadaan finansial dan hasil operasi dari sebuah perusahaan yang bermanfaat bagi banyak pengguna laporan keuangan dalam membuat keputusan ekonomi. Beberapa jenis laporan keuangan umum yang digunakan dalam suatu perusahaan meliputi:

- a. Laporan laba-rugi

Laporan laba-rugi adalah dokumen yang menunjukkan pendapatan dan biaya suatu perusahaan selama periode tertentu. Laporan ini menjadi tujuan utama dalam memutar tingkat keuntungan perusahaan dalam periode yang ditentukan.

b. Laporan perubahan ekuitas

Ini adalah laporan yang memberikan informasi mengenai jumlah modal yang dimiliki oleh perusahaan dalam periode tertentu.

c. Laporan posisi keuangan (Neraca)

Laporan ini menyajikan ringkasan tentang posisi keuangan dari perusahaan pada tanggal tertentu, terlihat dari total aktiva, kewajiban, dan modal yang dimiliki.

d. Laporan arus kas

Laporan ini menggambarkan perubahan posisi keuangan akibat aktivitas operasional, pengeluaran, dan investasi selama periode yang relevan. Selain itu, laporan ini juga menunjukkan informasi tentang arus kas masuk dan keluar dalam jangka waktu tertentu.

e. Catatan atas laporan keuangan

Catatan ini disusun untuk memberikan penjelasan yang lebih jelas, serta menawarkan wawasan dan informasi tambahan mengenai manajemen dan situasi perusahaan itu sendiri.

2.2 Penelitian Sebelumnya

Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian. Adapun hasil-hasil penelitian yang dijadikan perbandingan.

Penelitian yang dilakukan Agustina *et al.*, (2024) yang berjudul Pengaruh Tingkat Pemahaman Akuntansi, Komitmen Organisasi, Sistem Pengendalian Internal, Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan di LPD Kecamatan Sukasada. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini

adalah Kuantitatif, kuesioner, SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tingkat Pemahaman Akuntansi, Komitmen Organisasi, Sistem Pengendalian Internal, Sistem Informasi Akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

Penelitian yang dilakukan Aspasia *et al.*, (2023) yang berjudul Pengaruh Tingkat Pemahaman Akuntansi, Fungsi Badan Pengawas Dan Profesionalisme Terhadap Kualitas Laporan Keuangan LPD Di Kecamatan Abiansema Kabupaten Badung. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kuantitatif, regresi linear. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tingkat Pemahaman Akuntansi, Fungsi Badan Pengawas Dan Profesionalisme berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

Penelitian yang dilakukan Dwipayana *et al.*, (2024) yang berjudul Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi, Dan Kualitas Pelatihan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan LPD Kabupaten Jember. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kuantitatif, kuesioner via Google Form, SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi, Dan Kualitas Pelatihan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

Penelitian yang dilakukan Utari *et al.*, (2020) yang berjudul Pengaruh Kompetensi SDM, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan LPD di Kecamatan Kuta Selatan. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kuantitatif, kuesioner, SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kompetensi SDM, Pemanfaatan

Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

Penelitian yang dilakukan oleh (Hermayanti & Dewi, 2023) yang berjudul Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Fungsi Pengawasan, Good Corporate Governance, dan Tekanan Eksternal terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada LPD se-Kota Denpasar. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kuantitatif, kuesioner, SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemahaman Akuntansi, Fungsi Pengawasan, *Good Corporate Governance*, dan Tekanan Eksternal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Dwiyanti *et al.*, (2023) yang berjudul Pengaruh Profesionalisme, Fungsi Badan Pengawas, dan Tingkat Pemahaman Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Lembaga Perkreditan Desa di Kabupaten Gianyar. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemahaman Akuntansi, Etika Kepemimpinan, dan Fungsi Badan Pengawas Internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Pebriantari *et al.*, (2021) yang berjudul Pengaruh Tingkat Pemahaman Akuntansi, Fungsi Badan Pengawas dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan LPD di Kecamatan Gianyar. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kuantitatif, kuesioner, regresi linear. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Fungsi badan pengawas dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap

kualitas laporan keuangan, sedangkan pemahaman akuntansi tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Arimbawa *et al.*, (2024) yang berjudul Pengaruh Kompetensi SDM, Pemahaman Akuntansi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada LPD Se-Kecamatan Banjarangkan, Klungkung. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kuantitatif, kuesioner, SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kompetensi SDM, Pemahaman Akuntansi dan Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

Penelitian yang digunakan oleh Sara, (2022) yang berjudul Kompetensi SDM, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Kualitas Laporan Keuangan LPD. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kuantitatif, kuesioner, SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kompetensi SDM dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Putri *et al.*, (2023) yang berjudul Pengaruh Sistem Pengendalian Internal dan Kompetensi SDM terhadap Kualitas LKPD Bandung Barat. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kuantitatif, kuesioner, regresi linear. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sistem pengendalian internal dan kompetensi SDM berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Manuari *et al.*, (2023) yang berjudul Peran Teknologi Dalam Memoderasi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas

Laporan Keuangan LPD Kecamatan Mengwi. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Survei, regresi linier berganda, *purposive sampling*, 76 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemahaman akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan sedangkan teknologi informasi belum optimal dimanfaatkan fungsi badan pengawas tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Lestari *et al.*, (2023) yang berjudul Pengaruh Penerapan *Good Corporate Governance*, Sistem Pengendalian Internal dan Kompetensi Terhadap Kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Se-Kota Denpasar. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kuantitatif, survei, analisis regresi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Good corporate governance dan pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

Penelitian yang dilakukan Oleh Ferdiana *et al.*, (2024) yang berjudul Pengaruh Etika Kepemimpinan, Fungsi Badan Pengawas, Kualitas Sistem Informasi Akuntansi, Efektivitas Pengendalian Internal, Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Di Kecamatan Mengwi. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *purposive sampling* dengan kriteria sampel yaitu seluruh karyawan yang bekerja pada LPD di Kecamatan Mengwi yang berjumlah 306 orang, karyawan yang tidak bertugas menyusun laporan keuangan berjumlah 230 orang dan karyawan yang bekerja kurang dari satu tahun yaitu tidak ada, sehingga total sampel dalam penelitian ini yaitu 76 responden. Analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengaruh Etika Kepemimpinan, Fungsi Badan Pengawas, Kualitas Sistem

Informasi Akuntansi, Efektivitas Pengendalian Internal, Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Hadis *et al.*, (2022) yang berjudul Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda dengan pengujian hipotesis uji statistik Koefisien Determinasi (R^2), Simultan (Uji F) dan Uji Statistik t, jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Dewi *et al.*, (2024) Yang berjudul Pengaruh Tingkat Pemahaman Akuntansi, Fungsi Badan Pengawas, Sistem Informasi Akuntansi (SIA), Etika Kepemimpinan Dan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Di Kecamatan Gianyar. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *non probability sampling* dengan teknik *purposive sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tingkat pemahaman akuntansi, Teknologi Informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan sedangkan Fungsi badan pengawas, Sistem Informasi Akuntansi (SIA), Etika kepemimpinan tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada LPD di Kecamatan Gianyar.